AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Implementasi Peran Kodim 1605/Belu dalam Mengelola Potensi Wilayah Pertahanan Perbatasan Darat Nusa Tenggara Timur - Timor Leste

Widiyatmoko[1], Deni Dadang AR[2], Dwi Hartono[3]
Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia
denidar63@gmail.com[2], dwihartono11328@gmail.com[3]
E-mail Korespondensi : antoniuswidiyatmoko2805@gmail.com[1]

Submitted: 18th Sept 2025 | **Edited**: 26th Dec 2025 | **Issued**: 01st Jan 2026

Cited on: Widiyatmoko, W., Dadang AR, D., & Hartono, D. (2026). Implementasi Peran Kodim 1605/Belu dalam Mengelola Potensi Wilayah Pertahanan Perbatasan Darat Nusa Tenggara Timur - Timor Leste. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(1), 558-568.

ABSTRACT

This study addresses the gap between the normative role of district military commands (Kodim) within Indonesia's universal defense system and the persistent socio-economic and security challenges in land border areas. Border regions such as Belu-Malaka continue to face underdevelopment, poverty, and non-traditional threats, which potentially weaken territorial resilience. The research aims to analyze how Kodim 1605/Belu implements its role in managing territorial potential to strengthen border defense and community resilience along the Indonesia-Timor Leste land border. A qualitative case study approach was employed, with data collected through in-depth interviews with military personnel, local government officials, and community leaders, complemented by field observations and document analysis. Data were analyzed using an interactive model involving data reduction, thematic categorization, and contextual interpretation. The findings indicate that Kodim 1605/Belu has played a constructive role through integrated territorial development programs, including infrastructure support, community empowerment, and the cultivation of national defense awareness. These efforts have contributed to social cohesion and early threat detection at the community level. However, structural constraints such as limited resources, coordination gaps with civilian agencies, and geographical challenges remain significant. Strengthening inter-agency synergy and institutional integration is therefore essential to ensure the sustainability and effectiveness of territorial defense management in border areas.

Keywords: Kodim Role, Border Defense, Territorial Development, Community Resilience, Land Border

PENDAHULUAN

Implementasi Sistem Pertahanan Semesta (Sishankamrata) menuntut keterpaduan antara kekuatan militer dan non-militer melalui pengelolaan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam konteks geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan sejumlah negara, wilayah perbatasan memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap berbagai persoalan keamanan dan kesejahteraan

(Kementerian Pertahanan RI, 2020). Kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai garis demarkasi kedaulatan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang secara langsung merefleksikan kehadiran negara di beranda depan nasional.

Wilayah perbatasan darat antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks. Permasalahan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur dasar, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, serta masih munculnya ancaman non-tradisional seperti penyelundupan lintas batas, perdagangan ilegal, dan konflik kepentingan atas lahan komunal (BPS Provinsi NTT, 2023; Wibowo & Prasetyo, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan konvensional semata tidak cukup, sehingga diperlukan strategi pertahanan yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kerangka operasional pertahanan darat, Komando Distrik Militer (Kodim) memegang peran strategis sebagai satuan kewilayahan yang berfungsi melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter) guna menyiapkan wilayah pertahanan serta memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat (Perkasad Nomor 33 Tahun 2019). Kodim 1605/Belu, yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, dituntut untuk mampu mengelola potensi wilayah perbatasan secara optimal melalui sinergi antara aspek pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut kerap dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta dinamika sosial-politik lokal yang kompleks (Mulyawan, 2019).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan wilayah perbatasan sangat dipengaruhi oleh tingkat sinergi antarlembaga dan keterlibatan aktif masyarakat lokal. Studi Subagyo (2019) dan Fibrianto dkk. (2022) menegaskan bahwa peran satuan TNI di perbatasan tidak hanya bersifat pengamanan, tetapi juga mencakup fungsi sosial dan pemberdayaan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pertahanan di tingkat pusat dengan implementasinya di daerah perbatasan, terutama dalam konteks otonomi daerah dan tata kelola pembangunan (Siswanto, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari permasalahan utama berupa bagaimana implementasi peran Kodim 1605/Belu dalam mengelola potensi wilayah pertahanan di perbatasan darat NTT-Timor Leste di tengah berbagai keterbatasan

struktural dan dinamika lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk implementasi peran tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta menilai kontribusinya terhadap penguatan sistem pertahanan wilayah dan ketahanan sosial masyarakat perbatasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan pertahanan wilayah perbatasan yang lebih integratif, adaptif, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan dalam Konteks Pertahanan Wilayah

Implementasi kebijakan pertahanan wilayah merupakan proses strategis yang menjembatani kebijakan nasional dengan realitas operasional di tingkat lokal, khususnya pada wilayah perbatasan yang memiliki kompleksitas geografis dan sosial yang tinggi. Dalam perspektif kontemporer, implementasi tidak lagi dipahami sebagai proses administratif linear, melainkan sebagai arena interaksi aktor, sumber daya, dan lingkungan strategis yang dinamis (Howlett, Ramesh, & Perl, 2020). Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi pelaksana, kejelasan mandat, serta kemampuan adaptasi terhadap konteks lokal.

Dalam konteks pertahanan wilayah, implementasi kebijakan menuntut integrasi antara fungsi keamanan dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendekatan whole-of-government yang menekankan koordinasi lintas sektor dalam menangani ancaman non-tradisional di perbatasan, seperti kemiskinan struktural, konflik sosial, dan kejahatan lintas negara (Ansell, Sørensen, & Torfing, 2020). Oleh karena itu, Kodim sebagai satuan kewilayahan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pertahanan, tetapi juga sebagai aktor penghubung antara negara dan masyarakat.

Teori Peran Organisasi Militer Kewilayahan

Teori peran memandang organisasi sebagai entitas yang menjalankan seperangkat fungsi dan perilaku sesuai dengan ekspektasi sistem sosial tempatnya berada. Dalam konteks organisasi militer kewilayahan, peran Kodim mengalami perluasan dari fungsi pertahanan konvensional menuju peran sosial dan pembangunan yang lebih adaptif (Bennett, 2020). Perluasan ini merupakan respons terhadap perubahan karakter ancaman dan tuntutan keamanan manusia (human security).

Kodim 1605/Belu menjalankan peran kewilayahan melalui Pembinaan Teritorial (Binter), yang mencakup dimensi pertahanan-keamanan, pembinaan wilayah, dan komunikasi sosial. Peran ini bersifat kontekstual, artinya efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah perbatasan, termasuk struktur sosial adat, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan intensitas interaksi lintas batas (Yusoff & Sarjit, 2021). Dengan demikian, peran Kodim tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Komunikasi Strategis dan Sinergi Antarlembaga

Komunikasi strategis merupakan elemen kunci dalam pengelolaan pertahanan wilayah perbatasan, terutama untuk mengurangi ego sektoral dan membangun pemahaman bersama antarlembaga. Dalam studi keamanan kontemporer, komunikasi dipandang sebagai instrumen pembentuk legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kehadiran negara (Holsti, 2021). Efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh kemampuan aktor untuk mengelola pesan, saluran, dan umpan balik secara kontekstual.

Dalam praktik kewilayahan, Kodim perlu mengombinasikan komunikasi formal melalui mekanisme koordinasi pemerintahan dengan komunikasi informal berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini relevan untuk wilayah perbatasan yang masih kuat dipengaruhi oleh struktur adat dan relasi sosial tradisional. Sinergi komunikasi yang efektif memungkinkan kebijakan pertahanan diterjemahkan menjadi tindakan kolektif yang diterima masyarakat (Cavelty & Wenger, 2020).

Manajemen Konflik Sosial di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan darat rentan terhadap konflik sosial akibat tumpang tindih kepentingan ekonomi, klaim lahan, dan mobilitas lintas batas. Manajemen konflik dalam konteks ini menuntut pendekatan preventif dan kolaboratif, bukan semata-mata represif. Literatur mutakhir menekankan pentingnya conflict-sensitive governance yang mengintegrasikan keamanan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat lokal (Brinkerhoff, 2020).

Kodim sebagai aktor kewilayahan memiliki posisi strategis dalam mencegah eskalasi konflik melalui deteksi dini, mediasi sosial, dan penguatan kohesi komunitas. Keberhasilan manajemen konflik sangat ditentukan oleh kemampuan aparat untuk membaca situasi sosial serta memilih pendekatan yang proporsional dan kontekstual (Höglund & Orjuela, 2021).

Pengelolaan Potensi Wilayah dalam Perspektif Pertahanan Non-Militer

Pengelolaan potensi wilayah dalam kerangka pertahanan modern diarahkan pada pemanfaatan sumber daya lokal untuk memperkuat ketahanan nasional secara berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pertahanan, bukan sekadar objek kebijakan (Chandra & Bhonsle, 2019). Potensi wilayah meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi geografis, serta modal sosial yang dapat dikonversi menjadi kekuatan pertahanan non-militer.

Dalam konteks perbatasan NTT-Timor Leste, pengelolaan potensi wilayah menuntut integrasi antara pembangunan ekonomi lokal dan kepentingan pertahanan. Ketika kesejahteraan masyarakat meningkat dan kohesi sosial menguat, kerentanan terhadap ancaman transnasional dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, efektivitas peran Kodim dalam mengelola potensi wilayah menjadi indikator penting keberhasilan sistem pertahanan semesta di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai implementasi peran Kodim 1605/Belu dalam mengelola potensi wilayah pertahanan di perbatasan darat Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta dinamika sosial yang melekat pada praktik pembinaan teritorial di wilayah perbatasan, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif (Silverman, 2020). Desain studi kasus dipandang relevan karena penelitian ini berfokus pada satu entitas organisasi dalam konteks nyata yang kompleks dan spesifik, di mana batas antara fenomena dan lingkungan sosialnya tidak dapat dipisahkan secara tegas.

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Kodim 1605/Belu yang meliputi Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada kawasan yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Lokasi ini dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik strategis sebagai wilayah perbatasan darat sekaligus menghadapi permasalahan keamanan dan kesejahteraan yang saling berkaitan. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang

memungkinkan peneliti melakukan observasi lapangan secara memadai serta membangun interaksi intensif dengan informan kunci.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan relevansi peran, pengetahuan, dan pengalaman mereka terhadap isu yang diteliti. Informan terdiri atas unsur Kodim 1605/Belu, aparat teritorial di tingkat Koramil dan Babinsa, perwakilan pemerintah daerah yang menangani urusan perbatasan, serta tokoh masyarakat setempat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan mendalam dari aktor-aktor strategis yang terlibat langsung dalam pengelolaan wilayah perbatasan (Etikan, Musa, & Alkassim, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang fleksibilitas bagi informan dalam menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka, sekaligus menjaga fokus penelitian. Observasi lapangan digunakan untuk menangkap praktik pembinaan teritorial dan interaksi sosial secara langsung, sementara studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi, laporan kegiatan, dan kebijakan terkait pengelolaan wilayah perbatasan. Kombinasi ketiga teknik tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kedalaman dan keakuratan data melalui proses triangulasi.

Analisis data dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data berlangsung, menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh diseleksi dan dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk mengidentifikasi pola hubungan dan makna yang muncul. Proses analisis dilakukan secara iteratif, di mana temuan awal terus diuji dan diperkaya dengan data tambahan hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan konsisten (Saldaña, 2021).

Keabsahan data dijaga melalui penerapan prinsip kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan konfirmabilitas. Upaya yang dilakukan meliputi triangulasi sumber dan metode, diskusi sejawat, serta pengecekan ulang informasi kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian antara data dan interpretasi peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang memadai serta dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam konteks kajian pertahanan wilayah perbatasan.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Wilayah kerja Kodim 1605/Belu mencakup Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka yang secara geografis berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Karakteristik wilayah ini ditandai oleh keterbatasan infrastruktur dasar, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang relatif rentan, serta tingginya intensitas interaksi lintas batas. Kondisi tersebut menjadikan wilayah perbatasan tidak hanya sebagai ruang pertahanan fisik, tetapi juga sebagai arena sosial yang menuntut pendekatan keamanan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, Kodim 1605/Belu menjalankan fungsi kewilayahan melalui Pembinaan Teritorial (Binter) yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Implementasi Pembinaan Teritorial oleh Kodim 1605/Belu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kodim 1605/Belu mengimplementasikan Pembinaan Teritorial melalui tiga pilar utama, yaitu Bakti TNI, Komunikasi Sosial, dan Pembinaan Ketahanan Wilayah. Program Bakti TNI diwujudkan dalam kegiatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar, seperti pembukaan dan pengerasan jalan desa, pembangunan sarana air bersih, serta renovasi fasilitas umum melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan aksesibilitas wilayah, tetapi juga memperkuat mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan.

Pada aspek Komunikasi Sosial, Babinsa berperan aktif dalam membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pendekatan kultural, musyawarah adat, serta pendampingan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pola komunikasi ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat teritorial dan membuka ruang partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Sementara itu, Pembinaan Ketahanan Wilayah dilakukan melalui sosialisasi wawasan kebangsaan, pembinaan bela negara, serta pelatihan keterampilan dasar yang relevan dengan potensi lokal, seperti pertanian dan peternakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Hasil lapangan mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung dalam implementasi peran Kodim 1605/Belu, antara lain tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Babinsa, kuatnya modal sosial berbasis nilai gotong royong, serta dukungan informal dari tokoh adat dan tokoh agama. Kepercayaan ini tercermin dari keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan bersama Kodim, termasuk partisipasi sukarela dalam program pembangunan dan penyampaian informasi terkait potensi gangguan keamanan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan faktor penghambat yang bersifat struktural. Keterbatasan anggaran operasional, minimnya infrastruktur pendukung di wilayah terpencil, serta belum optimalnya koordinasi formal antara Kodim dengan perangkat daerah, khususnya lembaga pengelola perbatasan, menjadi kendala utama. Selain itu, tekanan ekonomi masyarakat perbatasan masih menjadi faktor yang berpotensi memicu aktivitas ilegal lintas batas.

Dampak Implementasi terhadap Ketahanan Wilayah

Implementasi Pembinaan Teritorial oleh Kodim 1605/Belu memberikan dampak nyata terhadap penguatan ketahanan wilayah perbatasan. Dampak tersebut terlihat pada meningkatnya kesadaran bela negara masyarakat, membaiknya hubungan sosial antara aparat dan warga, serta berkurangnya potensi konflik horizontal di tingkat desa. Selain itu, kehadiran Kodim secara berkelanjutan memperkuat mekanisme deteksi dini terhadap ancaman non-tradisional melalui jaringan informasi berbasis masyarakat.

Pembahasan

Pembinaan Teritorial dan Penguatan Ketahanan Wilayah Perbatasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan Kodim 1605/Belu sejalan dengan konsep pertahanan berbasis masyarakat yang menempatkan warga sebagai subjek utama dalam sistem pertahanan semesta. Hasil ini menguatkan temuan Subagyo (2019) dan Fibrianto et al. (2022) yang menegaskan bahwa peran satuan teritorial TNI di perbatasan tidak terbatas pada fungsi keamanan, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan pembangunan. Program Bakti TNI yang berorientasi pada infrastruktur dasar terbukti efektif sebagai instrumen pembangunan kepercayaan (trust-building) antara negara dan masyarakat perbatasan.

Komunikasi Sosial sebagai Instrumen Legitimasi Negara

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan komunikasi sosial berbasis kearifan lokal menjadi faktor kunci keberhasilan Kodim dalam membangun legitimasi di tingkat akar rumput. Temuan ini konsisten dengan pandangan Holsti (2021) yang menyatakan bahwa komunikasi strategis berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kehadiran negara. Dalam konteks wilayah perbatasan, komunikasi informal melalui tokoh adat terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan birokratis formal, terutama dalam meredam potensi konflik sosial.

Tantangan Struktural dan Kesenjangan Tata Kelola

Meskipun implementasi peran Kodim menunjukkan hasil positif, penelitian ini mengonfirmasi adanya kesenjangan struktural dalam tata kelola perbatasan. Lemahnya integrasi program antara TNI dan pemerintah daerah memperkuat temuan Siswanto (2024) dan Mulyawan (2019) yang menyoroti inkonsistensi kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Kondisi ini berpotensi membatasi keberlanjutan dampak Pembinaan Teritorial apabila tidak diiringi dengan sinergi kelembagaan yang lebih kuat.

Implikasi terhadap Pengelolaan Pertahanan Wilayah

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas peran Kodim 1605/Belu dalam mengelola potensi wilayah pertahanan sangat bergantung pada integrasi antara pendekatan sosial dan dukungan struktural. Ketika Pembinaan Teritorial didukung oleh kebijakan pembangunan daerah yang selaras, wilayah perbatasan dapat bertransformasi dari ruang perifer yang rentan menjadi beranda depan negara yang tangguh dan berdaulat. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pertahanan wilayah perbatasan memerlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan, bukan sekadar pengamanan teritorial semata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peran Kodim 1605/Belu dalam mengelola potensi wilayah pertahanan di perbatasan darat Nusa Tenggara Timur-Timor Leste telah berjalan secara fungsional dan adaptif dalam kerangka Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Melalui penerapan Pembinaan Teritorial yang terintegrasi, Kodim 1605/Belu mampu mengombinasikan fungsi pertahanan, komunikasi sosial, dan

pemberdayaan wilayah untuk memperkuat ketahanan sosial dan keamanan masyarakat perbatasan. Temuan empiris memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis komunitas, khususnya melalui program Bakti TNI dan peran aktif Babinsa, berkontribusi signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kesadaran bela negara di tingkat lokal.

Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih dibatasi oleh sejumlah kendala struktural, terutama keterbatasan sumber daya, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta belum optimalnya sinergi kelembagaan antara TNI dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan. Keterpisahan antara program pembinaan teritorial dan perencanaan pembangunan daerah berpotensi menghambat keberlanjutan dampak yang telah dicapai. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan integrasi kebijakan menjadi prasyarat penting agar pengelolaan potensi wilayah pertahanan tidak bersifat temporer, melainkan mampu menghasilkan ketahanan wilayah yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran Kodim di wilayah perbatasan tidak hanya relevan sebagai instrumen pengamanan teritorial, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam membangun ketahanan nasional dari tingkat lokal. Dengan dukungan kelembagaan yang lebih terintegrasi dan kebijakan pembangunan yang selaras, wilayah perbatasan berpotensi berkembang sebagai beranda depan negara yang aman, tangguh, dan berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2020). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector*. Cambridge University Press.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam angka 2023*. BPS Provinsi NTT.

Bennett, A. (2020). *Organizational roles and security institutions in changing threat environments*. Routledge.

Brinkerhoff, D. W. (2020). *Governance and conflict management in fragile settings*. Oxford University Press.

Cavelty, M. D., & Wenger, A. (2020). *Cyber security politics: Societal and state perspectives*. Oxford University Press.

Chandra, A., & Bhonsle, R. (2019). *Non-traditional security threats and border management*. Pentagon Press.

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2019). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 8(1), 1-4.

Fibrianto, E., Hidayat, T., Darmawan, W. B., & Djuyandi, Y. (2022). Interoperabilitas TNI dengan lembaga negara lain dalam mewujudkan pengamanan wilayah

perbatasan negara. *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(2), 119-128.

Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2020). *Collecting and analyzing qualitative data at scale*. Sage Publications.

Höglund, K., & Orjuela, C. (2021). *Hybrid peacebuilding and local conflicts*. Palgrave Macmillan.

Holsti, O. R. (2021). *Public opinion and national security*. Routledge.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan RI.

Mulyawan, R. (2019). Implementasi kebijakan pembangunan bidang pertahanan di wilayah perbatasan antarnegara dalam konteks otonomi daerah. *Jurnal Sosiohumaniora*, 21(2), 145-156.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer.

Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage Publications.

Silverman, D. (2020). *Interpreting qualitative data* (6th ed.). Sage Publications.

Siswanto, D. J. (2024). Implementasi ketahanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dalam rangka menegakkan kedaulatan negara. *Jurnal Mahatvavirya*, 4(1), 1-12.

Subagyo, A. (2019). Peran TNI dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia. *Insignia Journal of International Relations*, 8(1), 19-36.

Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Wibowo, A., & Prasetyo, E. (2020). Dinamika konflik perbatasan dan implikasinya terhadap keamanan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 345-360.

Yin, R. K. (2019). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

Yusoff, M. A., & Sarjit, S. G. (2021). Border security and community resilience in Southeast Asia. *Asian Journal of Political Science*, 29(3), 357-374.